

ABSTRAK

Banyaknya usaha perikanan di Indonesia saat ini, diantaranya usaha pengolahan hasil perikanan. Dimana saat ini semakin menjamurnya usaha ini terutama di daerah-daerah dekat pesisir pantai dengan wilayah yang cukup luas maupun daerah yang mempunyai wilayah laut dengan wilayah yang relatif kecil. Maka perlu adanya pengawasan di bidang perikanan terkait usaha perikanan dan produk hasil perikannya, untuk mengawasi jalannya usaha perikanan di Kabupaten Tegal, maka tentu saja perlu adanya peran pengawas perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tegal.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum atau yuridis yang dipadukan dengan penelaahan fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai objek penelitian yang menunjukkan fakta-fakta tentang pelaksanaan pengawasan produk hasil perikanan oleh pengawas perikanan dinas kelautan dan perikanan kabupaten tegal.

Sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah di pemerintahan Kabupaten Tegal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan, dan yang menjadi kewenangan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama, dan yang diluar kewenangan pemerintah terdapat 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan diantaranya termasuk ada urusan pada bidang kelautan dan perikanan.

Wilayah Kab. Brebes, Kota Tegal, Kab. Tegal dan Kab. Pemasang, pengawasan kelautan dan perikanan diserahkan pada Pengawas Perikanan Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang merupakan satuan kerja yang berada dibawah naungan langsung oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kata Kunci :

Hasil Perikanan, Pengawas Perikanan.